



KEPALA DESA PURWOREJO  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA PURWOREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara republic Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor...);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor ...)
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor....);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Purworejo Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Purworejo Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa purworejo Tahun 2011 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA PURWOREJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWOREJO TENTANG REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

BAB II  
REALISASI ANGGARAN  
Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp.1.523.365.251,20
b. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 683.769.259,20
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 419.382.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 58.250.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 1.477.826,53
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 410.600.000,00</u>

Jumlah Belanja	Rp. <u>1.573.479.085,73</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 50.113.834,54)

=====

c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.113.834,54
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. ....,-
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 50.113.834,54</u>
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 50.113.834,54

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

- Lampiran I :Laporan Realisasi APB Desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- Lampiran II :Rekapitulasi Laporan Kekayaan Milik Desa;
- Lampiran III:Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purworejo Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal, 6 Januari 2021  
KEPALA DESA PURWOREJO,

MOKHAMAD NYONO

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA PURWOREJO,

RINI PUSPA NINGSIH

LEMBARAN DESA PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA ....  
 NOMOR ..... TAHUN ....  
 TENTANG LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Desa ....  
 Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang  
 Tahun Anggaran 2019

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
2 Pendapatan Asli Desa	x
3 Dana Desa	x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
5 Alokasi Dana Desa	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	x
8 Pendapatan Lain lain	x
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	x
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	x
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	x
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	x
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan	
# Mendesak Desa	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
# Pembiayaan	x
# Aset Desa	x
# Penyertaan Modal Desa	x
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	x
Lampiran 2 - .....	x

LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA ....  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa	C.2	....	....	....
Pendapatan Transfer				....
Dana Desa	C.3	....	....	....
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	....	....	....
Alokasi Dana Desa	C.5	....	....	....
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	....	....	....
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	....	....	....
Pendapatan Lain lain	C.8	....	....	....
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	....	....	....
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	....	....	....
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	....	....	....
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	....	....	....
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	....	....	....
		....	....	....
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		....	....	....
<b>PEMBIAYAAN</b>	C.15	....	....	....
Penerimaan Pembiayaan		....	....	....
Pengeluaran Pembiayaan		....	....	....
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		....	....	....
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		....	....	....

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa .... , Kecamatan Senduro,  
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019

---

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa .... merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Lumajang No. .... Tanggal ..... Saat ini jabatan kades dan perangkat desa dijabat oleh :

Kepala Desa : ....

Sekretaris Desa : ....

Bendahara Desa : ....

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan ...., Desa ...., Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019	.....
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	....
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	....
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	..... (...)
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	.....
Saldo Kas per 31 Desember 2019	.....

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	.....	.....	.....
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/

			kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :	....	....	....
a. Hasil Usaha	....	....	....
b. Hasil Aset	....	....	....
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	....	....	....
d. Lain-lain PADes yang sah	....	....	....
	....	....	....

### 3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	....	....	....
Tahap 2	....	....	....
Tahap 3	....	....	....
	....	....	....

### 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	....	....	....
Tahap 2	....	....	....
	....	....	....

### 5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bulan Januari - Maret	....	....	....
Bulan April	....	....	....
Bulan Mei	....	....	....
dst,	....	....	....

### 6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bagian 1	....	....	....
	....	....	....

#### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Lumajang adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	....	....	....
Tahap 2	....	....	....
Tahap 3	....	....	....
	....	....	....

#### 8. Pendapatan Lain - lain

Pendapatan lain - lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	....	....	....
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	....	....	....
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	....	....	....
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	....	....	....
Koreksi kesalahan belanja tahun - tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	....	....	....
Bunga bank	....	....	....
Lain - lain pendapatan yang sah	....	....	....
	....	....	....

#### 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	....	....	....

Belanja Barang dan Jasa	....	....	....
Belanja Modal	....	....	....
	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>

Belanja - Bidang Pembangunan Desa  
 Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	....	....	....
Belanja Modal	....	....	....
	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
 Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	....	....	....
Belanja Modal	....	....	....
	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
 Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	....	....	....
Belanja Modal	....	....	....
	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak  
 Desa  
 Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
.....	....	....	....
.....	....	....	....
	<u>....</u>	<u>....</u>	<u>....</u>

Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	....	....	....

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	....	....	....
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	....	....	....
Tunjangan BPD	....	....	....
	....	....	....
Belanja Barang dan Jasa	....	....	....
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	....	....	....
Belanja Jasa Honorarium	....	....	....
Belanja Operasional Aparatur Desa	....	....	....
Belanja Jasa Sewa	....	....	....
Belanja Operasional Perkantoran	....	....	....
Belanja Pemeliharaan	....	....	....
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	....	....	....
	....	....	....
Belanja Modal	....	....	....
Belanja Modal Pengadaan Tanah	....	....	....
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	....	....	....
Belanja Modal Kendaraan	....	....	....
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	....	....	....
Belanja Modal Jalan	....	....	....
Belanja Modal Jembatan	....	....	....
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	....	....	....
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	....	....	....
Belanja Modal lainnya	....	....	....
	....	....	....
	....	....	....
Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			(Lebih)/
	Anggaran	Realisasi	kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	....	....	....
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	....	....	....
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	....	....	....
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	....	....	....
Sub Bidang Pertanahan	....	....	....
	....	....	....
	....	....	....

Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	....	....	....
Sub Bidang Kesehatan	....	....	....
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	....	....	....
Sub Bidang Kawasan Permukiman	....	....	....
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	....	....	....
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	....	....	....
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	....	....	....
Sub Bidang Pariwisata	....	....	....
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	....	....	....
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	....	....	....
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	....	....	....
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	....	....	....
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	....	....	....
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	....	....	....
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	....	....	....
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	....	....	....
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	....	....	....
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	....	....	....
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	....	....	....
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	....	....	....
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	....	....	....
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	....	....	....
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	....	....	....
Sub Bidang Keadaan Darurat	....	....	....
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	....	....	....
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	....	....	....

Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	....	....	....
Pengeluaran Pembiayaan	....	....	....
	....	....	....
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:	....	....	....
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	....	....	....
2. Pencairan Dana Cadangan	....	....	....
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	....	....	....
	....	....	....
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	....	....	....
2. Penyertaan Modal Desa	....	....	....
	....	....	....

#### Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut, \_\_\_\_\_

	2018	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	....	....	....
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	....	....	....
Kendaraan	....	....	....
Gedung dan Bangunan	....	....	....
Jalan	....	....	....
Jembatan	....	....	....
Irigasi / Embung / Air Sungai / Drainase	....	....	....
Jaringan / Instalasi	....	....	....
Aset Tetap lainnya	....	....	....
Konstruksi dalam Pengerjaan	....	....	....
	....	....	....

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

#### Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2018	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	....	....	....
BUMDes YYY	....	....	....
.....	....	....	....
	....	....	....

KEPALA DESA ....

(.... )

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : ....  
Kecamatan : Senduro  
Kabupaten : Lumajang  
Provinsi : Jawa Timur

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana

.....  
Kepala Desa

(.... )



LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER\*

TAHUN ANGGARAN .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT							SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c											
		Jumlah											

.....  
 Kepala Desa  
 ttd  
 (.....)

Keterangan: